

PERENCANAAN SOSIAL DI INDONESIA*

Sutomo ROESNADI

I. PENDAHULUAN

Sebagaimana telah dimaklumi hakikat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Bertolak dari pengertian tersebut maka jelas bahwa rencana pembangunan fisik atau perencanaan pembangunan ekonomi saja, tanpa memperhatikan perencanaan pembangunan sosial, akan menjadi timpang.

Seperti telah diungkapkan pula dalam GBHN tujuan setiap pembangunan adalah selalu sama, yaitu:

- (a) meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat;
- (b) meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya.

Dalam trilogi Pembangunan yang baru diistilahkan pada pelaksanaan Repelita II, tetapi pada hakikatnya telah menjadi landasan setiap kebijaksanaan, pembangunan mulai Repelita I jelas ditonjolkan Trilogi yang pertama ialah faktor keadilan sosial:

”Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat; sedangkan yang menyangkut pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilisasi nasional yang sehat dan dinamis, menempati masing-masing trilogi kedua dan ketiga.”

Pada Pelita III rumusan tujuan mengenai aspek-aspek pembangunan dalam bidang sosial tampak lebih jelas lagi, yaitu: ”Meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat yang makin merata dan adil”.

*Makalah yang disampaikan pada Lokakarya Latihan dan Pendidikan Perencanaan Pembangunan Daerah, Prapat, 29 Agustus 1981. Dr. Sutomo ROESNADI adalah Staf Pengajar FIS-UI dan bekas Direktur Studi Pembangunan Indonesia FIS-UI - ISS Den Haag.

Bagaimana pentingnya aspek *keadilan sosial* dalam pembangunan Nasional telah mendapat perhatian luar biasa dari wakil-wakil rakyat di MPR dengan dikeluarkannya Ketetapan-ketetapan MPR tahun 1978 dan pikiran-pikiran yang berkembang dalam sidang MPR tahun 1978 tersebut. Sehingga Presiden menggariskan tujuh sasaran yang harus dicapai dalam Repelita III, seperti tertera dalam *Sapta Krida* Kabinet Pembangunan III. Dari *Sapta Krida* Kabinet Pembangunan III tersebut ternyata bahwa masalah pembangunan sosial menempati urutan pertama dan berbunyi sebagai berikut: "Terciptanya keadaan dan suasana yang makin menjamin tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat dengan makin meratakan pembangunan dan hasil-hasilnya".

Asas pemerataan untuk menuju terciptanya keadilan sosial tampak semakin jelas setelah dituangkan dalam *Delapan Jalur Pemerataan* pada Pelita III tersebut, yaitu:

- (1) Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak khususnya pangan, sandang dan perumahan.
- (2) Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan.
- (3) Pemerataan pembagian pendapatan.
- (4) Pemerataan kesempatan kerja.
- (5) Pemerataan kesempatan berusaha.
- (6) Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita.
- (7) Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah Tanah Air.
- (8) Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

Dalam Pelita III Pembangunan Sosial Budaya dikategorikan menjadi satu dengan pembangunan dibidang Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Penjabaran perencanaan sosial dalam bidang sosial budaya tercakup aspek-aspek sebagai berikut:

- (a) bidang pendidikan;
- (b) bidang kebudayaan;
- (c) bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- (d) bidang kesehatan, keluarga berencana dan kependudukan;
- (e) bidang perumahan dan kesejahteraan sosial;
- (f) bidang pengembangan generasi muda dan peranan wanita dalam pembangunan.

Sejak pelaksanaan Pelita III telah sama-sama kita saksikan realisasi dari aspek-aspek perencanaan sosial di pelbagai penjuru Tanah Air. Namun itu tidak berarti bahwa kita harus merasa puas dengan hasil-hasil yang telah dicapai dalam berbagai bidang perencanaan sosial tersebut. Diantaranya terdapat hambatan-hambatan yang harus segera diatasi, di samping masih harus dicari modus-modus untuk menyempurnakan perencanaan dan realisasi pembangunan sosial yang telah ada. Tugas tersebut tidak hanya terletak pada pundak para perencana dari pusat, tetapi dengan dikeluarkannya Keppres No. 27 Tahun 1980, maka kesempatan diberikan kepada pemerintah daerah dan perencana daerah untuk berpartisipasi dalam memformulasikan perencanaan dari bawah.

II. DEFINISI PERENCANAAN

Perencanaan pada hakikatnya berkisar pada usaha mengalokasikan sarana secara rasional untuk mencapai tujuan yang tertentu dalam waktu yang tertentu pula, atau mungkin pula dapat dikatakan bahwa perencanaan adalah suatu usaha proses yang terorganisasi, didasari dan kontinyu untuk memilih alternatif langkah dan alokasi sarana yang terbaik untuk mencapai tujuan tertentu.

Adanya fungsi pengawasan terhadap setiap pelaksanaan rencana pembangunan adalah mutlak, untuk mengetahui sampai di mana terdapat kemajuan dan kapan terjadi kemacetan, dan bagaimana cara mengatasinya. Karena itu dalam fungsi pengawasan tercakup fungsi monitoring dan evaluasi, atau pengendalian dan penilaian. Dengan adanya fungsi monitoring dan evaluasi tersebut, setiap masalah atau hambatan dapat dideteksi sedini mungkin dan penanganan dapat dicari secepat-cepatnya.

III. BEBERAPA WILAYAH PERMASALAHAN DALAM PERENCANAAN SOSIAL

Dari sekian banyak wilayah permasalahan dalam perencanaan pembangunan sosial yang terdapat dalam Pelita III, terutama bidang-bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan, perumahan, generasi muda dan peranan wanita dalam pembangunan akan mendapat sorotan khusus dalam penyajian ini.

1. Pendidikan Formal

Dari sekian banyak wilayah permasalahan dalam perencanaan sosial dibidang pendidikan, yang antaranya telah direalisasikan penyebarannya SD Inpres, guru-guru SD, penghapusan SPP pada tingkat SD, pendidikan luar sekolah, kepramukaan, penggalakan sekolah-sekolah swasta, pemberantasan buta huruf dan program kerja lainnya.

Dalam pelaksanaan rencana pembangunan di bidang pendidikan tersebut yang harus kita camkan dan perhatikan tidak hanya sekedar mencapai target seperti yang direncanakan, tetapi yang lebih penting ialah adanya kesinambungan, pemeliharaan, peningkatan dan kelestarian dari pelaksanaan pembangunan pendidikan tersebut.

Misalnya bagaimana caranya menurunkan jumlah angka putus sekolah sebanyak mungkin. Tidak itu saja, tetapi harus dicari alasan-alasan apa yang menyebabkan seorang anak putus sekolah. Dalam kaitan ini faktor-faktor lingkungan, kehidupan ekonomi, sosial budaya seorang keluarga di suatu wilayah harus diselidiki. Misalnya kebutuhan dari para orang tua untuk memperoleh bantuan tenaga dari anak-anak mereka, yang merupakan dukungan utama dalam peningkatan penghasilan keluarga. Karena itu dalam pelaksanaan rencana pendidikan formal, tidak selalu mutlak harus ada keseragaman jadwal waktu belajar di seluruh tanah air.

Jadwal waktu belajar tersebut seyogyanya disesuaikan dengan kegiatan dan kebutuhan daerah. Misalnya jika di suatu daerah bantuan tenaga kerja anak-anak yang dibutuhkan orang tua adalah pada pagi hari, maka pendidikan formal tersebut dapat diadakan pada sore hari dan sebaliknya.

Dengan demikian diharapkan bahwa jumlah anak putus sekolah akan dapat dikurangi, atau dihapuskan sama sekali, dan si anak dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan bantuan tenaga oleh orang tua mereka. Begitu pula pendirian dan penyediaan sarana pendidikan berupa gedung-gedung sekolah, peralatan, dan tenaga-tenaga pengajar tidak akan sia-sia, artinya kekurangan anak didik hingga menganggunya, sarana-sarana tersebut akan dapat dihindarkan sejauh-jauhnya.

Memperkecil jumlah anak putus sekolah dan memungkinkan anak-anak untuk menyelesaikan pendidikan pada suatu jenjang waktu tertentu adalah penting. Karena dengan adanya orang-orang yang berpendidikan dalam masyarakat, maka akan terus ditingkatkan motivasi ke arah dinamisasi pembangunan. Mereka dapat mengisi dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan dengan lebih bergairah lagi karena dengan pendidikan yang diperolehnya mereka memahami arti pembangunan bagi masyarakat.

Salah satu aspek penting dalam perencanaan sosial di bidang pendidikan, dan juga sebetulnya untuk setiap perencanaan sosial di bidang lainnya, ialah metode yang benar dalam pengumpulan data. Karena kalau data yang dihimpun tidak sesuai maka perencanaan tersebut tidak akan mengenai sasaran yang dituju.

Karena target pendidikan pada umumnya adalah anak-anak usia sekolah, dan mereka adalah anggota dari suatu keluarga atau rumah tangga, maka informasi mengenai kondisi rumah tangga/keluarga harus relevan dengan kehidupan anak-anak, yaitu informasi mengenai pendapatan rumah tangga, pengeluaran, konsumsi, rumah dan peralatannya, sanitasi, air bersih, letak pusat fasilitas kesehatan dan lain sebagainya. Pada umumnya survai rumah tangga yang dilakukan hampir di semua negara berkembang bersifat survai ekonomi untuk memperoleh data mengenai pendapatan dan pengeluaran rumah tangga, terutama ditujukan untuk penentuan indeks biaya hidup, pencegahan inflasi, analisa pasar dan lain sebagainya.

Sedangkan survai rumah tangga untuk mengetahui kondisi sosial, seperti perumahan, sanitasi lingkungan, air bersih dan fasilitas kesehatan yang sangat penting bagi perkembangan anak-anak jarang dilakukan. Tidak jarang terjadi bahwa hasil analisa survai ekonomi tersebut menganggap remeh eksistensi anak-anak dalam keluarga, sehingga adanya kemiskinan yang menimpa anak-anak tersebut menjadi tidak tampak.

2. Pendidikan Non-Formal/Luar Sekolah

Adanya kebijaksanaan pemerintah dalam pemerataan pendidikan tidak menjamin secara mutlak bahwa setiap anak akan dapat memperoleh pendidikan secara tuntas dan berkesinambungan. Banyak faktor mungkin akan terungkap jika survai sosial dalam masyarakat dengan lebih akurat dan tepat dapat dilakukan.

Pada akhir Pelita II diharapkan bahwa anak-anak usia SD yang dapat teresap ialah sekitar 85%. Menurut keterangan Bapak Presiden Soeharto di depan Sidang DPR pada tanggal 15 Agustus 1981 pada pertengahan Pelita III ini masih terdapat sekitar 10% anak-anak usia SD yang belum tertampung.

Hasil tersebut cukup menggembirakan, terutama merupakan persiapan yang menggairahkan menjelang dilaksanakannya Wajib Belajar bagi seluruh anak-anak di Indonesia.

Namun demikian belum terserapnya sejumlah anak-anak usia SD tersebut, ditambah lagi dengan adanya sejumlah anak-anak putus sekolah, cukup mem-

prihatinkan kita. Terutama bagi anak-anak putus sekolah, karena mungkin saja akibat kesibukan anak-anak membantu orang tua, atau terisolasi-nya tempat tinggal mereka yang jauh letaknya dari fasilitas sekolah maka mereka putus sekolah. Maka akhirnya apa yang mereka telah peroleh selama pendidikan dasar di SD untuk dua atau tiga tahun akan hilang sama sekali, atau mungkin mereka menjadi buta huruf kembali. Sehingga usaha-usaha yang telah demikian banyak menyita waktu, tenaga, fikiran dan uang akan menjadi sia-sia, karena perencanaan sosial dalam bidang pendidikan tersebut tidak melakukan monitoring dan evaluasi dari hasil pelaksanaan perencanaannya.

Untuk menanggulangi masalah tersebut, maka pemerintah telah menyusun program pendidikan non-formal atau luar sekolah, yang selain membantu kesempatan untuk bersekolah kembali atau belajar bagi mereka yang putus sekolah, juga menolong mereka yang tidak pernah memperoleh kesempatan bersekolah sama sekali. Sehubungan dengan itu Program Kejar telah dirintis tahun 1978 di beberapa daerah pilot project di Indonesia.

Pendidikan non-formal/luar sekolah bagi mereka yang putus sekolah sudah tentu bertujuan untuk mengarahkan mereka pada sasaran positif, sehingga mereka nantinya menjadi warganegara yang bermanfaat bagi masyarakat. Diusahakan agar mereka dapat menciptakan sumber-sumber pekerjaan sendiri di daerah mereka sendiri, atau paling tidak merupakan beban bagi orang tua dan masyarakat.

Dengan adanya program pemerintah dalam Pelita III untuk meratakan pembangunan, maka pemerataan pendidikan itu juga dimaksudkan agar angkatan kerja muda tersebut tidak berbondong-bondong ke kota-kota besar, tetapi agar betah di daerah mereka sendiri. Dengan demikian urbanisasi dapat dikurangi atau dicegah sebanyak mungkin.

Program pendidikan non-formal bagi mereka yang belum pernah memperoleh pendidikan atau buta huruf memang penting sekali, karena pemerataan hasil pembangunan kita ini harus dinikmati oleh seluruh anggota masyarakat. Kebutuhurufan merupakan pangkal kebodohan dan kemelaratan. Hal ini terang tidak sesuai dengan suatu masyarakat yang sedang membangun demi peningkatan kecerdasan dan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial melalui industrialisasi dan modernisasi pertanian.

Bagi negara yang sedang melaksanakan industrialisasi dan modernisasi pertanian tersebut jelas bahwa melek huruf merupakan syarat mutlak untuk berhasilnya program tersebut. Selain untuk meningkatkan kemakmuran bangsa dan negara kita sendiri, maka dalam dunia yang penuh persaingan ketat ini

ketrampilan dan kecakapan setiap warganegara adalah mutlak jika kita ingin meningkatkan daya saing kita demi untuk kelestarian bangsa dan negara.

Pelita I sampai Pelita III tidak hanya sekedar meningkatkan proyek-proyek padat karya saja, dengan memperkerjakan tenaga-tenaga yang tidak terampil, tetapi ternyata semakin banyak melaksanakan proyek-proyek padat karya yang membutuhkan tenaga-tenaga terampil. Karena itu tidak jarang terjadi bahwa pada suatu proyek industri besar (raksasa) di suatu daerah, misalnya Asahan, Cilacap, Arun, Bontang, Tembapura dan lain sebagainya, fihak kontraktor tidak bisa mempergunakan tenaga kerja lokal karena tidak terampil, tetapi harus mendatangkan tenaga-tenaga dari luar daerah yang terampil. Jika hal ini tidak dipadukan dalam suatu perencanaan sosial yang mantap, maka akan terjadi keresahan sosial yang tidak dikehendaki.

Sekitar 80% dari penduduk Indonesia masih bermukim di daerah pedesaan, dan sebagian besar dari mereka mengandalkan pencahariannya di bidang pertanian. Beberapa segi dan teknik pertanian tradisional yang masih menguntungkan kita akan tetap dipertahankan, atau ditingkatkan daya gunanya. Kita tidak memungkiri ketrampilan para petani kita mengolah tanah yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita ribuan tahun yang lalu. Tetapi kitapun tidak dapat menutup mata untuk kenyataan bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, semakin menyempitnya lahan-lahan pertanian, dan semakin berkurangnya kesempatan kerja di bidang pertanian, maka mau tidak mau suatu usaha modernisasi pertanian harus dilancarkan secara bertahap. Penggunaan pupuk, obat-obatan, tanaman jenis unggul, mekanisme selektif, pemasaran hasil-hasil pertanian, jelas membutuhkan orang-orang atau petani yang mengerti baca tulis, dan berhitung. Misalnya melalui PPL, Kelompok Tani, Siaran Radio Pedesaan, Siaran TVRI Desa atau Daerah Membangun, para petani dapat memahami dan mampu melaksanakan bimbingan atau pengarahan-pengarahan yang diberikan melalui PPL atau media massa tersebut. Hal-hal seperti operasi irigasi, penggunaan campuran pupuk kimiawi dan insektisida dan pestisida, membuat kalkulasi mengenai banyaknya benih untuk sawah, volume air yang diperlukan agar tanaman tumbuh secara optimal, dewasa ini jelas membutuhkan petani yang lebih terpelajar daripada waktu-waktu yang lampau.

Di masa lalu para petani kita karena kebodohan dan kemiskinannya dalam pendidikan selalu menjadi bulan-bulanan para lintah darat, tengkulak, bahkan sementara pejabat pemerintah setempat sendiri, sehingga tidak jarang mereka tertipu dan menjadi korban dari kebodohnya tersebut.

Membebaskan mereka dari tiga buta, yaitu: (a) buta aksara dan angka; (b) buta Bahasa Indonesia; dan (c) buta pendidikan dasar (pengeta-

huan/informasi fungsional; ketrampilan dan sikap mental pembaharuan dan pembangunan), adalah sangat penting agar mereka juga dapat menikmati hasil-hasil pembangunan nasional kita. Sehingga dari prosedur memperoleh bahan baku, mengerjakan produksi, dan memasarkan hasil-hasil pertanian atau industri kecil mereka, mereka akan cukup mempunyai bekal pengetahuan dasar yang tidak memungkinkan mereka terperangkap atau tertipu atau menjadi korban orang-orang yang lebih terpelajar tetapi perbuatan-perbuatannya sangat merugikan orang-orang di pedesaan.

Secara garis besar dan umum, baik pendidikan formal maupun pendidikan non-formal, selain dapat meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri, juga penting agar setiap kebijakan dan program-program pemerintah tidak hanya sekedar sampai pada rakyat, tetapi betul-betul dapat difahami dan disadari dengan penuh rasa tanggung jawab. Dengan demikian partisipasi anggota masyarakat dalam pembangunan akan dapat meningkat, karena memang pemerataan pendidikan betul-betul meresap dan berjalan dengan tuntas dan mantap.

3. Perencanaan Pembinaan Generasi Muda

Perencanaan Pembinaan Generasi Muda dalam pembangunan begitu dirasakan penting oleh Pemerintah dan masyarakat, karena sebagian besar dari jumlah penduduk terdiri dari angkatan muda. Kita ingin bahwa apa yang telah dibangun oleh para pendahulu kita maupun oleh kita sekarang akan dapat diwariskan kepada generasi penerus berikutnya dengan hasil-hasil yang lebih meningkat, di samping apa yang telah dihasilkan sekarang akan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Kalau kita tidak seawal mungkin menggalang pembinaan generasi muda ini, maka dapat dibayangkan hasil-hasil yang tidak dapat diharapkan di kemudian hari.

Sehubungan dengan itu kegiatan generasi muda harus diarahkan pada hal-hal yang lebih positif, produktif dan konstruktif, disertai pembinaan kecintaan kepada tanah air dan bangsa yang semakin tebal. Pendataan dan perencanaan untuk pembangunan generasi muda ini memerlukan pekerjaan yang lebih seksama lagi. Hambatan-hambatan dan penanggulangannya harus didekati sedini mungkin, agar tidak merupakan masalah-masalah yang semakin bertumpuk dan tak terkendalikan.

Secara garis besar dapat dikumpulkan data-data jumlah pemuda putus sekolah, berapa persen yang tertampung dalam berbagai jenis pekerjaan, berapa persen yang menganggur, berapa persen yang tinggal menetap di desa dan berapa persen yang pindah ke kota-kota. Kursus-kursus ketrampilan apa yang

paling disukai dan paling relevan dengan situasi dan kondisi di daerah tersebut. Kemudian daripada itu fasilitas olahraga dan rekreasi apa yang tersedia di daerah tersebut, bagaimana penggunaan dan pemeliharaannya. Karena sering terjadi bahwa telah tersedia fasilitas olahraga dan rekreasi lainnya, tetapi ternyata tidak terjangkau oleh kebanyakan pemuda desa dengan berbagai macam alasan. Kemudian pekerjaan-pekerjaan sukarela yang bersifat sosial apakah yang bisa menggalakkan aspirasi para pemuda di daerah. Pengaruh-pengaruh negatif, apakah yang datang dari dalam maupun dari luar daerah yang dapat menyelewengkan generasi muda, hendaknya dapat dideteksi seawal mungkin dan dicari penyelesaiannya dengan tepat.

Dengan mendidik kader-kader generasi muda yang dapat membawa mereka kepada hal-hal yang positif diharapkan bahwa potensi yang besar yang terkandung dalam kalangan generasi muda dapat diarahkan pada proyek-proyek pembangunan yang lebih konstruktif dan produktif lagi.

4. Perencanaan Kebudayaan Nasional

Sangat erat hubungannya dengan perencanaan pendidikan dan generasi muda adalah perencanaan kebudayaan nasional. Seperti dijelaskan oleh Pemerintah beberapa waktu yang lalu, "Pengembangan kebudayaan nasional adalah usaha sadar untuk memelihara, menghidupkan, memperkaya, membina, menyebarluaskan dan memanfaatkan segenap perwujudan dan keseluruhan hasil fikiran, kemauan serta perasaan manusiawi Indonesia dalam rangka perkembangan/kepribadian manusia, perkembangan hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, untuk dihayati, diresapi dan dinikmati oleh masyarakat."

Menyadari hubungan erat antara pendidikan dan pengembangan kebudayaan berarti mengakui pentingnya pendidikan yang terus menerus, apabila ia hendak dikaitkan secara fungsional dan efektif dengan pengembangan kebudayaan. Sebab hanya apabila pendidikan dan kebudayaan itu dikaitkan secara erat akan terlihat betapa pentingnya pendidikan ditanggapi sebagai suatu proses yang berlangsung seumur hidup secara terpadu, artinya pendidikan sekolah saling mengisi dan melengkapi dengan pendidikan luar sekolah.

Penerapan pendidikan yang terus-menerus (seumur hidup) pada pengembangan kebudayaan membutuhkan serangkaian sarana teknis yang kompleks, seperti pembangunan prasarana dan sarana yang sepadan, pusat kebudayaan, sanggar kegiatan belajar, pusat ilmu pengetahuan, pusat audio visual,

museum, perpustakaan, klub olahraga dan pencinta alam, dan lain-lain yang semakin mendesak untuk diarahkan pada program pendidikan orang dewasa dan acara guna mengisi waktu senggang bagi penduduk pedesaan ataupun bagi orang tua dan para cacad.

Penyelenggaraan kegiatan kebudayaan dapat atau sebaiknya dilakukan oleh pemerintah dan swasta secara bersama, sehingga anggota masyarakatpun mempunyai tanggung jawab (termasuk generasi muda) untuk melestarikan dan memelihara kebudayaan nasional tadi.

Masalah ini sangat penting mengingat sangat terbukanya Tanah Air kita untuk pengaruh kebudayaan yang datang dari luar. Agar kita dapat mempertahankan dan melestarikan kebudayaan nasional yang ada dan menyerap kebudayaan asing yang positif untuk memperkaya kebudayaan yang telah ada, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi serta pengawasan yang terus-menerus, terpadu dan terkoordinasi dengan berbagai instansi pemerintah maupun swasta.

Dalam rangka perencanaan dan pembangunan kebudayaan nasional tersebut para perencana daerah perlu mengadakan inventarisasi kebudayaan di daerahnya yang memerlukan pelestarian dan perlindungan sebelum menjadi punah atau hilang sama sekali. Para perencana daerah dengan bantuan tenaga-tenaga peneliti terutama dari tingkat perguruan tinggi perlu mengadakan penelitian tentang pengaruh-pengaruh negatif yang datang dari luar daerah yang sekiranya dapat menyingkirkan nilai-nilai kebudayaan bangsa.

IV. PERENCANAAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN PENELITIAN

Meskipun para perencana pusat lebih berwenang dan banyak mengetahui perencanaan bidang-bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan penelitian secara nasional, peranan para perencana daerah penting sekali dalam bidang-bidang tersebut. Tidak jarang terjadi bahwa suatu daerah menerapkan teknologi yang sebetulnya tidak cocok untuk daerah tersebut sehubungan dengan kepadatan penduduk, topografi, jenis industri di kawasan tersebut dan lain sebagainya. Para perencana daerah harus memperhitungkan penggunaan teknologi, tidak hanya sekedar ikut-ikutan atau latah, tetapi betul-betul sadar akan kegunaannya di daerah tersebut, sesuai dengan tenaga, dana, dan kebutuhan daerah tersebut.

Mengingat bahwa lembaga pengetahuan, terutama perguruan tinggi, telah menyebar ke seluruh penjuru Tanah Air, maka perencanaan daerah harus

mendayagunakan kapabilitasnya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi serta penelitian bagi kepentingan pembangunan daerah. Misalnya sejumlah Kabupaten di Propinsi Jawa Barat telah memanfaatkan sejumlah perguruan tinggi yang ternama, seperti UI, ITB dan IPB untuk ikut merencanakan pembangunan daerah dalam berbagai bidang. Walaupun demikian, tidak serta merta apa yang disarankan mereka harus diserap atau diterima oleh para perencana daerah, seandainya para perencana daerah merasa yakin bahwa apa yang disarankan itu belum mengena betul sasarannya. Karena mungkin sejumlah perguruan tinggi yang ada belum banyak pengalaman dalam penerapan teori untuk praktek, maka perlu kiranya dijalin kerja sama yang harmonis antara lembaga-lembaga perguruan tinggi dan para perencana daerah agar dapat dicapai hasil yang semaksimal mungkin untuk pembangunan daerah.

Karena berbagai macam teknologi berbagai tingkat (rendah, madya, tinggi, tepat guna) masuk ke berbagai wilayah Indonesia, maka perlu lebih meningkatkan kesadaran dan kepekaan bangsa kita terhadap arus teknologi baru tersebut, dengan cara menyaring dan meneliti sedalam-dalamnya sebelum kegunaannya dalam praktek dapat diterapkan untuk jangka panjang. Karena tidak jarang terjadi bahwa apa yang merupakan teknologi baru bagi negara kita mungkin bagi negara asalnya sudah merupakan teknologi yang usang dan tidak berguna lagi. Sehingga nantinya dalam memperoleh suku cadang atau pemeliharaan selanjutnya akan ditemui kesukaran bagi para pemakainya. Masalah yang sama berlaku bagi obat-obatan, insektisida bagi tanaman.

Untuk lebih meningkatkan daya inspirasi dan inovasi bangsa kita dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kita tidak boleh puas dan sekedar pandai merakit, kemudian meniru dan mengerjakan substitusi impor dari negara asalnya, tetapi hendaknya diusahakan peningkatan mutu, penyesuaian penggunaannya di negara kita, terjadinya inovasi, penemuan yang baru dari teknologi asalnya. Dalam hal ini tidak ada hal yang lebih penting bagi perencana, baik di pusat maupun di daerah, daripada mengusahakan didirikannya museum-museum teknologi atau industri, terutama di daerah yang dapat merangsang para pemuda kita untuk menjadi lebih kreatif, inovatif dan menemukan hal-hal yang baru, yang dapat meningkatkan kemampuan teknologi dan ilmu pengetahuan bangsa dalam taraf internasional. Pelajar sekolah maupun mahasiswa perguruan tinggi, selain didorong untuk menjadi pencinta alam sehingga cinta tanah air akan semakin tebal, hendaknya juga dimungkinkan secara teratur mengadakan widya wisata ke kawasan-kawasan industri maupun proyek-proyek raksasa yang dapat mendorong motivasi lebih tinggi lagi bagi para pemuda kita tersebut.

V. PERENCANAAN KESEHATAN

Jika tadi diuraikan bagaimana pentingnya bidang pendidikan untuk meningkatkan daya motivasi, pembaharuan dan mental pembangunan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kegairahan kerja, memungkinkan kerja lebih trampil, dan menggalakkan partisipasi rakyat dalam pembangunan, maka sangat erat kaitannya dengan perencanaan pendidikan ialah perencanaan dalam bidang kesehatan.

Rakyat yang telah memperoleh pendidikan akan mengerti masalah-masalah kesehatan, di mana kesehatan merupakan pangkal dari segala kegiatan seseorang dalam masyarakat, dan pendorong bagi dinamisasi pembangunan nasional. Bidang kesehatan ini juga meliputi masalah-masalah yang luas. Dari peningkatan gizi, keluarga berencana, sanitasi lingkungan, air bersih, jamban keluarga, air susu ibu, pendeteksian dan penanggulangan sedini mungkin penyakit menular, penggunaan obat-obatan, pelayanan kesehatan dan lain sebagainya. Sudah barang tentu masalah-masalah kesehatan tersebut harus didukung oleh tenaga kesehatan serta fasilitas kesehatan yang memadai, agar pelayanan kesehatan masyarakat dapat dijangkau oleh segala lapisan masyarakat, terutama oleh golongan miskin.

Dalam perencanaan kesehatan inipun sangatlah penting bahwa pengumpulan data diusahakan selengkap mungkin. Karena setiap data yang masuk yang tidak atau kurang memiliki kebenaran, akan menghasilkan suatu perencanaan kesehatan yang keliru, dan akhirnya yang akan menanggung rugi adalah masyarakat sendiri. Jika perencanaan dalam bidang kesehatan tersebut dapat disusun dan kemudian dilaksanakan dengan baik, kita yakin bahwa masalah-masalah defisiensi gizi, keluarga berencana, angka kematian, perpanjangan usia akan dapat ditangani sehingga setiap anggota masyarakat akan merupakan warganegara yang aktif dan dinamis yang berguna bagi pembangunan bangsa dan negara.

Dengan telah dikeluarkannya Keppres No. 27 Tahun 1980 untuk pembentukan Bappeda Tingkat II di seluruh Indonesia, maka perencanaan dari bawah bukan lagi sekedar idam-idaman, tetapi telah merupakan kenyataan yang harus segera diisi oleh kita semua. Sehubungan dengan itulah maka perencanaan kesehatan harus pula disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah dan terkoordinasi dengan instansi-instansi vertikal yang ada di wilayah tersebut. Misalnya letak suatu puskesmas, balai pengobatan, penempatan Dokter Inpres, penyediaan tenaga paramedis, harus betul-betul terencana dalam perumusan masalah kesehatan yang jelas. Tidak jarang terjadi bahwa para perencana pusat lebih mementingkan formula umum dalam pe-

rencanaan kesehatan tersebut, misalnya untuk sekian jumlah penduduk dibutuhkan sekian banyak tempat tidur rumah sakit, sekian banyak tenaga dokter dan paramedis, Puskesmas dan lain sebagainya. Tetapi untuk suatu wilayah tertentu formula umum tersebut mungkin tidak mengena, karena sifat dan kondisi penduduk dan wilayah berlainan dengan wilayah lain, sehingga segala kebutuhan dan fasilitas yang bersifat umum tadi tidak berlaku untuk wilayah tertentu. Terjadinya pelaksanaan fasilitas kesehatan yang bersifat duplikasi agar sejauh mungkin dihindarkan, misalnya adanya di satu daerah instansi-instansi pemerintah maupun swasta yang menyediakan fasilitas kesehatan dalam bidang-bidang yang sama.

Sehubungan dengan usaha menggalakkan perencanaan dari bawah, maka para perencana daerah terutama Bappeda Tingkat II harus betul-betul siap dan berani mengemukakan kebutuhan dan fasilitas kesehatan yang diperlukan untuk daerahnya. Sudah tentu tidak hanya asal mengemukakan, tetapi harus dengan bukti-bukti dan argumentasi yang masuk akal dan data-data yang akurat. Mungkin metode perencanaan program kesehatan, baik dari pusat maupun dari daerah sendiri, akan mempergunakan data yang sama, tetapi mungkin penguangannya dalam perencanaan akan berbeda antara perencana pusat dan perencana daerah. Perencana pusat akan lebih menonjolkan kebutuhan kesehatan yang bersifat nasional dan berusaha untuk menyeragamkannya, sebaliknya perencana daerah akan lebih mengetahui, mengenali dan merasakan kebutuhan kesehatan daerahnya sendiri.

Secara garis besar langkah-langkah pokok serta bahan yang dihasilkan dalam penyusunan program kesehatan secara berurutan adalah sebagai berikut:

| <i>Langkah-langkah pokok</i> | <i>Bahan-bahan yang dihasilkan</i> |
|---|--|
| 1. Analisa status kesehatan masyarakat dan faktor-faktor lingkungan | - Keadaan kesehatan masyarakat dan faktor lingkungan fisik, sosial, budaya-ekonomi dan antropologi yang mempengaruhinya, baik pada saat ini maupun yang diperkirakan pada saat akhir Pelita III. |
| 2. Analisa, kegiatan, sarana kesehatan dan hambatan-hambatan | - Kebijaksanaan program dan teknologi dari kegiatan yang ada, sarana-sarana kesehatan dan hambatan-hambatan. |
| 3. Perumusan masalah kesehatan | - Perumusan masalah kesehatan terutama mengenai status kesehatan beserta urutan tingkatan pengutamaannya. |
| 4. Penyusunan tujuan usaha peningkatan kesehatan | - Tujuan program-program kesehatan, dalam pengertian pengurangan masalah kesehatan terutama mengenai status kesehatannya. |

- | | |
|---|---|
| 5. Penyusunan strategi | - Strategi atau kebijaksanaan kesehatan Pelita III yang meliputi pendekatan atau intervensi untuk menanggulangi masalah-masalah kesehatan dengan cara yang berhasil dan berdaya guna. |
| 6. Penyusunan rencana program | - Usulan Pola perencanaan kesehatan mencakup usulan kerangka pokok program, termasuk pula pengutamaan proyek yang perlu disusun perincian rencananya. |
| 7. Penyampaian dan Pembahasan rencana program | - Perbaiki usulan pola rencana kesehatan setelah diadakan pengambilan keputusan oleh Pimpinan. (Departemen Kesehatan jika di pusat, dan Kanwil Kesehatan jika di daerah). |

Meskipun sudah dilalui langkah-langkah pokok dan kemudian diperoleh bahan-bahan yang dihasilkan untuk menyusun pola perencanaan kesehatan, dalam pelaksanaannya pasti akan terdapat hambatan-hambatan dan kekurangan-kekurangan yang berada di luar dugaan si perencana sendiri. Dalam kaitan inilah diperlukan kepekaan dari pihak perencana untuk secara terbuka menerima segala input yang datang baik dari mereka yang berkecimpung dalam bidang kesehatan maupun dari anggota masyarakat pemakai pelayanan kesehatan dan terutama dari media massa. Segala input, baik yang positif maupun yang negatif, akan sangat berguna untuk mengolah perencanaan kesehatan kemudian, sehingga segala macam kekeliruan dan kesalahan yang lampau dapat dihindarkan.

1. Peningkatan Gizi

Usaha-usaha peningkatan gizi harus disesuaikan dengan bahan-bahan yang tersedia di daerah masing-masing, karena bagaimanapun baiknya suatu perencanaan peningkatan gizi, kalau bahan-bahannya yang diperlukan tidak ada di wilayah tersebut, atau bahan-bahan itu tersedia tetapi daya beli masyarakat belum mampu, semuanya itu tidak akan banyak gunanya. Jadi setiap unsur atau bahan yang dapat meningkatkan nilai gizi yang ada di daerah harus diinventarisasi, sehingga hanya unsur-unsur atau bahan-bahan yang betul-betul tidak ada di wilayah tersebut akan didatangkan.

Dalam hubungan tersebut di atas para perencana daerah harus berlomba dan bersaing dengan para pedagang makanan dan obat-obatan yang banyak diperdagangkan di daerah yang belum tentu nilai gizinya bermutu dan sesuai dengan kebutuhan daerahnya.

Sasaran yang harus mendapat prioritas utama dalam peningkatan gizi tersebut terutama ialah anak-anak balita dan usia sekolah, karena setiap kekurangan gizi yang diderita oleh anak-anak akan membawa pengaruh yang tidak sedikit dalam pertumbuhan jasmani dan rohani mereka selanjutnya. Untuk dapat mengetahui ada tidaknya defisiensi gizi pada anak-anak, suatu penelitian yang intensif harus dilakukan.

2. Air Susu Ibu

Dengan meningkatnya hasil susu bubuk untuk makanan bayi, maka peranan air susu ibu (ASI) dikuatirkan semakin berkurang, kalau tidak dapat dikatakan punah sama sekali.

Penggalakan penggunaan Air Susu Ibu, selain akan merupakan penghematan biaya bagi para ibu di pedesaan maupun perkotaan, juga akan menghasilkan pertumbuhan anak-anak yang relatif lebih sehat daripada mereka yang menggunakan susu bubuk. Tentu saja dengan syarat bahwa kesehatan si ibu baik, atau menurut nasihat Dokter si ibu yang bersangkutan memberikan ASI kepada bayinya.

Walaupun kaum ibu di kota-kota besar mungkin sangat sibuk dengan kerjanya atau sementara ibu menjadi karyawan, ASI sebaiknya jangan ditinggalkan sama sekali, tetapi satu atau dua kali sehari diberikan juga pada bayi mereka.

Para perencana kesehatan daerah harus mengetahui betul dari data-data yang dihimpun berapa persen bayi-bayi yang memperoleh ASI dan berapa persen yang hanya mengandalkan susu bubuk.

3. Penggunaan Obat-obatan

Bermunculannya berbagai jenis obat-obatan telah mendorong rakyat Indonesia, baik yang tinggal di perkotaan maupun di pedesaan, untuk beramai-ramai menggunakan obat-obatan modern. Tidak dapat disangkal bahwa menurut penelitian yang seksama dari berbagai laboratorium obat modern, sejumlah besar dari obat-obatan tersebut memiliki khasiat tinggi. Dalam usaha pemerataan kesehatan biasanya suatu paket pelayanan kesehatan beserta obat-obatan diberikan kepada penderita pengunjung Puskesmas atau balai-balai pengobatan lainnya.

Bagaimanapun murah pelayanannya kesehatan rakyat di Puskesmas, untuk umumnya rakyat desa, terutama yang tergolong di bawah garis kemiskinan, setiap rupiah yang mereka keluarkan akan besar artinya. Karena itu dalam membuat perencanaan kesehatan, faktor-faktor ekonomi rakyat harus betul-betul diperhitungkan agar obat-obatan yang dijual terjangkau oleh mereka. Syukur kalau dapat dicari suatu cara lain agar pelayanan kesehatan bagi golongan miskin atau yang berpenghasilan sangat rendah untuk wilayah-wilayah tertentu dapat dibebaskan sama sekali dari pembiayaannya.

Di samping itu penggunaan obat-obatan tradisional maupun penggunaan jasa-jasa dukun harus dicari kemungkinannya berdasarkan pertimbangan hasil-hasil penelitian yang seksama maupun kebijaksanaan pemerintah. Karena mungkin sejumlah rakyat yang bermukim di daerah yang sangat terisolasi tidak dapat mendatangi puskesmas, tetapi diketahui bahwa terdapat tanaman-tanaman yang berkhasiat di daerahnya.

Juga penggunaan obat tradisional untuk tujuan lain, misalnya jamu, patut dicari kemungkinannya. Perlu diselidiki mengapa jamu sampai begitu menyebar di seluruh pelosok Tanah Air dan seolah-olah dengan meminum jamu orang pasti akan memperoleh kesehatan yang diperlukan. Barangkali dalam kaitan ini jamu dapat dipakai sebagai alat kampanye untuk keluarga berencana.

4. Sanitasi Lingkungan

Rakyat di suatu daerah pemukiman dapat saja dipaksa agar lingkungan di mana mereka berada memenuhi syarat-syarat kesehatan agar dapat hidup lebih sehat. Ada atau tidak adanya pendidikan atau tinggi rendahnya pendidikan seseorang juga akan mempengaruhi kesadaran dan tanggung jawab akan sanitasi lingkungan.

Walaupun demikian kita menyaksikan pula bahwa di kota-kota besar pada umumnya rakyat lebih terpelajar tetapi ada juga yang mengabaikan sama sekali kesehatan lingkungan tersebut. Dalam hal sanitasi lingkungan para perencana kesehatan tidak hanya sekedar merencanakan berapa biaya yang harus dialokasikan untuk program tersebut, tetapi yang lebih penting ialah daya kemampuan masyarakat untuk memelihara dan melestarikan sanitasi lingkungan yang telah ada dan menjadikan sanitasi lingkungan sebagai way of life mereka.

Bagi mereka yang mengabaikan sanitasi lingkungan, barangkali harus diberikan semacam sanksi agar mereka menjadi patuh. Dalam hubungan ini,

para perencana daerah harus meneliti apakah dengan direalisasikannya suatu proyek sanitasi lingkungan, misalnya jamban keluarga di suatu desa, betul-betul rakyat akan mempergunakannya. Karena pengalaman menunjukkan bahwa suatu proyek jamban keluarga telah direalisasi di suatu desa, tetapi rakyat tetap mempergunakan sungai, ladang atau tempat lainnya untuk buang hajat, dan tidak mempergunakan jamban keluarga (MCK) untuk maksud tersebut. Sehingga proyek yang memakan biaya cukup banyak tersebut akhirnya mubazir. Para perencana daerah harus meneliti bagaimana mengusahakan agar rakyat mau mempergunakan jamban keluarga dan meninggalkan kebiasaan lamanya. Usaha melalui persuasi, dan bukan secara perintah dan komando, terutama melalui anak-anak sekolah, mungkin cara yang terbaik untuk mengubah kebiasaan rakyat tersebut.

5. Penyakit Menular

Karena kebodohan dan ketidak-perduliannya, maka suatu penyakit menular yang menjangkit seseorang tidak segera dilaporkan oleh anggota masyarakat dengan berbagai pertimbangan, misalnya malu diketahui orang lain bahwa mereka mendapat serangan penyakit menular. Atau mungkin rakyat tidak mengetahui bahwa jenis penyakit yang diderita itu adalah penyakit menular dan mereka percaya bahwa mereka mampu untuk mengatasinya.

Dalam hubungan ini maka pendeteksian seawal mungkin oleh para pejabat kesehatan, entah melalui RT/RK atau kelurahan, harus diusahakan dan tindakan preventif dilakukan. Mencari data atau pendeteksian penyakit menular mungkin tidak mudah, karena sifat tertutupan rakyat. Tetapi usaha yang harus dilakukan dengan cara lain ialah menyebarkan informasi tentang jenis-jenis penyakit menular yang berbahaya kepada rakyat, dengan memberitahukan bahaya-bahaya dan tindakan-tindakan apa yang harus segera dilakukan oleh si penderita atau keluarganya.

6. Air Bersih

Di daerah-daerah tertentu di tanah air kita terdapat kesukaran-kesukaran untuk memperoleh air bersih, terutama untuk minum, mandi dan cuci. Mungkin karena sifat daerahnya yang tandus, atau karena kebiasaan rakyat yang turun temurun, orang menggunakan air sembarangan saja tanpa memperdulikan kebersihannya.

Mempergunakan air bersih secara konvensional, misalnya mengambil air bersih lewat pipa dan dari sumur artesis, memang memerlukan biaya yang ti-

dak sedikit dan adanya bantuan pemerintah adalah mutlak. Di samping perencanaan air bersih yang konvensional, maka ada baiknya diinventarisasikan kemungkinan menyaring air mentah, sungai menjadi air bersih dengan penyulingan sederhana.

Hasil pengembangan PKMD (Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa) di beberapa daerah teknik penjernihan air minum untuk pedesaan adalah sebagai berikut: digunakan pasir, kerikil, pecahan genting, serat dan tawas sebagai bahan pengendapannya. Proses ini mempergunakan gentong, kuali, jembangan atau barang-barang lain yang tersedia di sekitarnya. Atau pemakaian tanah liat untuk membuat jamban keluarga dan saluran air. Jalan lain ialah melindungi distribusi air minum dengan mempergunakan bambu yang tertutup yang terlebih dahulu ruas-ruasnya dibuka.

Yang lebih penting dalam perencanaan air bersih ialah seberapa jauh rakyat dapat mengubah kebiasaan lama, mau meninggalkan alam mereka dan akhirnya bersedia untuk mempergunakan air bersih tersebut. Dalam hubungan ini para perencana harus bekerja sama dengan guru-guru sekolah dan pemilik-pemilik pabrik untuk mempergunakan murid-murid sekolah atau pegawai-pegawai pabrik sebagai juru penerang langsung kepada keluarga mereka masing-masing. Sudah tentu dalam kesempatan upacara atau selamatan dan lain sebagainya kampanye penggunaan air bersih harus pula diadakan. Kehadiran mahasiswa KKN, BUTSI dan terus-menerus mengingatkan rakyat akan manfaat air bersih bagi kesehatan.

7. Keluarga Berencana

Sering kita dengar bahwa di suatu daerah target Keluarga Berencana berhasil dengan telah dicapainya sejumlah akseptor dari sekian jumlah penduduk. Namun masih perlu diteliti oleh pihak perencana kesehatan, apakah tercapainya jumlah akseptor itu hanya terjadi karena terdaftar semata-mata, atau secara konsekuen mereka menjadi akseptor aktif dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Dalam hubungan ini suatu kampanye KB harus betul-betul disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing, dan kebiasaan serta adat istiadat, agama atau kepercayaan rakyat harus diperhatikan oleh setiap perencana KB. Meskipun suatu perencanaan KB secara nasional harus seragam, karakteristik setiap daerah KB harus mendapat perhatian khusus dari setiap perencana KB agar dapat dicapai hasil yang semaksimal mungkin.

Seperti halnya dalam bidang-bidang lainnya, maka peranan monitoring dan evaluasi tentang jumlah akseptor dari waktu ke waktu harus dilakukan untuk mengetahui apakah meningkat, menurun, atau statis. Apabila jumlah

itu statis atau menurun, harus segera dicari sebab-sebabnya dan diatasi sedini mungkin, agar perencanaan berikutnya akan lebih baik.

VI. PERANAN WANITA DALAM PEMBANGUNAN

Mengingat pentingnya peranan wanita dalam pembangunan, maka dalam Kabinet Pembangunan III telah diangkat seorang Menteri Muda Urusan Peranan Wanita. Untuk menyukseskan peranan wanita dalam pembangunan, maka sudah tentu data-data dari daerah sangat penting dalam rangka mengembangkan kebijaksanaan peranan wanita tersebut.

Dalam kaitan ini data-data mengenai status wanita yang kawin dan belum kawin atau tidak kawin, jumlah anak, wanita yang cerai, wanita jompo, wanita yang bekerja, wanita sebagai kepala rumah tangga harus mendapatkan sorotan yang lebih tajam dari perencana daerah.

Jika di suatu daerah diadakan kursus-kursus ketrampilan wanita, maka lembaga-lembaga kursus harus dapat menyesuaikan kebutuhan kursus dengan daerah tempat kursus diberikan, dan oleh sebab itu harus mengetahui apakah bahan-bahan untuk kursus itu tersedia di daerah tadi.

Tidak jarang terjadi, terutama di kota-kota besar, bahwa kaum wanita disibukkan oleh berbagai macam kegiatan atau organisasi, sehingga tugas pokok memelihara keluarga, terutama anak-anak, menjadi terlantar. Akibatnya bisa fatal. Seperti sering kita lihat anak-anak kurang terurus akibat tidak adanya atau kurangnya perhatian dari ibu-ibu tersebut, karena mereka terpaksa membagi waktunya untuk keluarga, arisan, organisasi, pekerjaan sosial, atau bekerja. Dalam membuat perencanaan peranan wanita dalam pembangunan hal itu perlu disesuaikan.

Sebaliknya di desa-desa, di samping wanita yang bekerja mungkin terdapat sejumlah wanita yang tidak bekerja sama sekali kecuali mengurus anak dan suami. Jelas bahwa akan terdapat waktu terluang bagi wanita-wanita tersebut, dan soalnya ialah peranan apa yang dapat diberikan kepada mereka untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Mereka bisa mengerjakan kerajinan tangan, membuat kue, jahit-menjahit dan lain sebagainya, yang selain berguna untuk menambah pendapatan keluarga, juga dapat menggairahkan kerajinan di daerah tersebut.

VII. BIDANG PERUMAHAN

Dengan makin meningkatnya jumlah penduduk, maka masalah perumahan makin terasa bagi para perencana. Terutama di kota-kota besar, sukarnya

dan mahalny mendapatk tanah perumahan merupakan masalah besar bagi rakyat yang berpenghasilan rendah, khususnya pegawai negeri golongan te-rendah.

Dengan diangkatnya Menteri Muda Urusan Perumahan Rakyat, maka se-jak beberapa tahun terakhir telah dikeluarkan kebijaksanaan nasional menge-nai perumahan rakyat, yang murah dan terjangkau oleh lapisan rakyat ber-penghasilan rendah. Di beberapa kota besar di seluruh Indonesia telah diba-ngun ribuan rumah murah dan sederhana yang dapat dibeli dengan jalan ang-suran jangka panjang.

Dalam merencanakan rumah-rumah tipe Perumnas tersebut, maka sangat penting untuk diperhatikan oleh para perencana daerah agar tidak terjadi spe-kulasi tanah, sehingga tanah yang akan dipergunakan rakyat banyak menjadi mahal harganya, dan proyek Perumnas akhirnya mengalami kelambatan. Di-samping itu harus diperhatikan agar tanah yang akan dipakai membangun Pe-rumnas bukan tanah pertanian yang subur, atau tanah yang seyogyanya meru-pakan jalur hijau di suatu wilayah perkotaan. Dalam hal ini soalnya tidak ha-nya sekedar membangun perumahan saja, tetapi juga faktor-faktor lingkung-an hidup harus diperhatikan oleh para perencana.

Perencanaan perumahan bagi rakyat di desa-desa terang tidak akan sama dengan Perumnas untuk para karyawan atau pegawai negeri di kota-kota besar. Seperti telah dilakukan di sementara daerah sistem pemugaran rumah-rumah desa yang telah ada mulai dirintis. Dalam hubungan ini kita hendaknya pula mengingat situasi dan kondisi daerah, serta memperhatikan segi arsitektur rumah desa yang sifatnya serba guna.

VIII. KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

1. Kesimpulan

Garis-garis besar perencanaan sosial seperti diuraikan di atas jelas tidak sa-ma dengan perencanaan-perencanaan sosial yang telah dilakukan pada waktu-waktu sebelumnya, tetapi terang mempunyai suatu tujuan yang tunggal, ialah bagaimana meningkatkan kualitas kehidupan rakyat Indonesia untuk seka-rang dan waktu-waktu yang akan datang.

Untuk dapat membuat perencanaan sosial yang betul-betul mendekati ke-sempurnaan, maka kita harus mengetahui indikator-indikator sosial yang oleh sebab itu harus diselidiki secara terus-menerus dan teratur agar perencanaan

sosial yang kita inginkan dapat lebih akurat dalam pelaksanaannya. Cara mengukur tiap-tiap indikator sosial itu mungkin ada yang bersifat tahunan, setengah tahunan, kuartalan, dua tahun sekali, atau setiap lima tahun sekali. Hal ini tergantung pada sifat dari indikator sosial yang akan kita teliti.

Mencari indikator-indikator sosial melalui pencacahan, penelitian, atau bentuk-bentuk survei lainnya terang akan memakan banyak biaya. Beberapa jenis cara yang lebih murah mungkin dapat dilakukan oleh perencana daerah. Misalnya pendaftaran kematian, kelahiran, atau yang sakit, yang biasanya masing-masing dilakukan di Kelurahan, Puskesmas, atau tempat-tempat lain (RT/RK) merupakan sumber utama untuk mencari data-data tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir ini semakin banyak peneliti, terutama dari perguruan tinggi, atau mahasiswa yang ber-KKN, yang dapat diberi tugas tambahan oleh para perencana daerah untuk mencari data-data tertentu yang diperlukan untuk perencanaan sosial. Misalnya mengenai sanitasi lingkungan, perumahan, keluarga berencana, dan lain sebagainya.

2. Saran-saran

Dalam rangka penyebaran pembangunan ke seluruh wilayah Nusantara, maka lebih banyak lagi proyek industri besar dan kecil akan dibangun di daerah-daerah, baik di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa. Keadaan ini akan berakibat makin banyaknya masalah-masalah sosial yang akan timbul.

Pemerataan pendidikan yang sudah mulai dirasakan oleh rakyat, terutama pendidikan dasar, akan juga menimbulkan harapan-harapan pada penduduk untuk bergerak ke arah tingkat yang lebih tinggi.

Perkembangan teknologi komunikasi yang semakin pesat akan juga menyempitkan jurang antara kota dan desa, sehingga langsung atau tidak langsung akan timbul pengaruh-pengaruh yang positif maupun negatif bagi masyarakat pedesaan dalam berbagai bidang kehidupan sosial budaya mereka.

Sehubungan dengan akan lebih banyaknya masalah-masalah sosial budaya dalam waktu-waktu mendatang, terutama menjelang dilancarkannya Pelita IV, maka kebringasan sosial para perencana daerah harus mulai digalakkan, dengan secara terus-menerus dan sedini mungkin mencari data-data yang dianggap perlu untuk mempersiapkan perencanaan sosial di masa-masa yang akan datang.

Para perencana maupun pemerintah daerah sendiri harus peka dan akomodatif terhadap kritikan-kritikan yang bersifat membangun yang datang da-

ri masyarakat, terutama media massa, yang nantinya akan bermanfaat sebagai input bagi formulasi perencanaan sosial berikutnya.

Dalam metode pengumpulan data-data sosial budaya, maka para perencana daerah tidak boleh merasa puas dengan data yang dikumpulkan dalam satu kali wawancara saja. Karena sering terjadi, bahwa responden orang-orang pedesaan akan memberi jawaban yang kurang benar dan hanya untuk menyenangkan pihak penginterview saja. Apalagi jika penginterview disertai oleh seorang pejabat Pemda atau Pusat. Berhubung dengan hal tersebut maka jika waktu dan uang memungkinkan, maka mengenai beberapa masalah sosial tidak cukup dilakukan pendataan hanya satu kali jalan saja, tetapi mungkin harus lebih dari satu kali untuk memperoleh jawaban yang benar dari responden.

Adanya data yang seakurat mungkin sangat penting bagi para perencana, agar pembuatan analisa untuk perumusan kebijaksanaan perencanaan sosial tidak meleset karena kekeliruan data yang diperoleh.

Sebelum si perencana daerah menerima rekomendasi yang datang dari orang luar daerah yang mungkin kelihatannya menarik, maka terlebih dahulu harus digali sedalam-dalamnya setiap potensi yang ada di daerah tersebut untuk mengembangkan perencanaan sosial yang feasible untuk daerah tersebut. Sebaliknya hal itu tidak berarti bahwa setiap saran atau usulan orang luar daerah mengandung hal-hal yang kurang mengena untuk perencanaan sosial daerah. Terdapat kemungkinan juga bahwa para peneliti luar daerah mampu melihat kemungkinan atau potensi-potensi sosial daerah, yang tidak bisa dilihat oleh orang daerah sendiri.

Jadi suatu jalinan kerja sama erat antara para perencana daerah dan para peneliti luar daerah harus dikoordinasi sedemikian rupa, sehingga daerah akan memperoleh manfaat semaksimal mungkin untuk kepentingan pengembangan sosial di daerah tersebut.

CATATAN KEPUSTAKAAN:

1. Direktur Tata Kota dan Tata Daerah, *Kumpulan kuliah-kuliah dalam rangka Kursus Perencanaan Sosial Pengembangan Area ke-6*, Sanur-Bali, 3 Nopember-16 Desember 1978.
2. *Kumpulan Bahan Pelajaran Kursus Perencanaan Daerah*, Kerja Sama Departemen Dalam Negeri, Universitas Gajah Mada, tanpa tanggal.

3. Donald Brieland, Lela B. dan Charles R. Atherton, (Eds.), *Contemporary Social Work: An Introduction to Social Work and Social Welfare*, Mc Graw-Hill Book Company, New York, 1975.
4. Donald Mc Granahan, *Improvement of Information on the Conditions of Children*.
5. *Measuring the Quality of Life: Philippine Social Indicators*, Development Academy of the Philippines, 1975.
6. *Garis-garis Besar Haluan Negara*, Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978.
7. J.B.W. Kuitenbrouwer, *A Farewell to Welfare*, ISS Occasional Paper, Institute of Social Studies, The Hague, 1979.
8. C.A.O. Van Nieuwenhuijze, "On Social Development," *The Studies*, The Hague, 1979.
9. Karel Jansen, *Educational Planning: The Asian Experience*, ISS Occasional Papers, Institute of Social Studies, The Hague, 1979.
10. Antoni Kuklinski (Eds.), *Social Issues in Regional Policy and Regional Planning*, Mouton, The Hague, Paris, 1977.
11. Muhammad Shamsul Huq, *Education and Development Strategy in South and Southeast Asia*, East-West Center Press, Honolulu, 1965.
12. Sutomo Roesnadi, "Potensi Wilayah dan Modernisasi Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan," Makalah disajikan pada Lokakarya Pemantapan Perencanaan Pembangunan Daerah: Kerja Sama Pemerintah Daerah Tingkat II Sukabumi dengan IPB-ITB dan UI pada tanggal 17 Maret 1981.